



Indonesia Sebagai *Middle Power*: Strategi *Niche Diplomacy* dalam Manifestasi Pembangunan Kelautan Berkelanjutan Berbasis *Blue Economy*

Abdul Basir Donny Polanunu

Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia; email: abbasdonny@gmail.com

Demeiati Nur Kusumaningrum

Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia; email: demeiati.kusumaningrum@gmail.com

| Submit: 17-11-2021

| Accept: 25-07-2022

| Publish: 12-08-2022

Keywords

*Blue Economy,
Indonesia, Middle
Power, Sustainable
Maritime
Development.*

ABSTRACT

This research aims to analyze the strategy of the Indonesian government in realizing sustainable marine development based on its role as a middle power. The author uses the identity theory framework of middle power and niche diplomacy to analyze the problems in this research. This research is a type of qualitative research that is explained using an explanatory method. Based on the research results, the Indonesian government's strategy is to prioritize sustainable marine development in the national marine policy and is also committed to contributing to the world's sustainable marine development with the blue economy. This commitment will be realized by increasing cooperation in the maritime sector at the bilateral, multilateral, and regional levels. Specifically, Indonesia has become to be an initiator of the formation of a cooperation forum (coalition building), to be a liaison between countries in the interest of sustainable marine development (bridge builder), and to enforce norms international in the marine sector for the common good (catalyst).

Kata Kunci

*Blue Economy,
Indonesia, Middle
Power,
Pembangunan
Kelautan
Berkelanjutan.*

ABSTRAK

Penelitian ini memiliki tujuan spesifik untuk menganalisis strategi pemerintah Indonesia dalam mewujudkan pembangunan kelautan berkelanjutan berdasarkan perannya sebagai negara *middle power*. Penulis menggunakan kerangka teori identitas *middle power* dan *niche diplomacy* untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang dijelaskan menggunakan metode eksplanatif. Berdasarkan hasil penelitian, strategi pemerintah Indonesia ialah memprioritaskan pembangunan kelautan berkelanjutan dalam kebijakan kelautan nasional dan juga berkomitmen untuk memberi kontribusi pada pembangunan kelautan berkelanjutan dunia dengan prinsip *blue economy*. Komitmen tersebut akan diwujudkan dengan cara meningkatkan kerjasama dibidang kelautan pada tingkat bilateral, multilateral, dan regional. Secara spesifik bentuk dari perwujudan komitmen tersebut ialah Indonesia telah menjadi strategi pemerintah Indonesia mewujudkan pembangunan kelautan berkelanjutan ialah menjadi inisiator pembentukan forum kerjasama (*coalition building*), menjadi narahubung negara-negara dalam kepentingan pembangunan kelautan berkelanjutan (*bridge builder*), dan menegakkan norma internasional pada sektor kelautan untuk kepentingan bersama (*catalyst*).

PENDAHULUAN

Blue Economy dimaknai sebagai sebuah ide atau model kebijakan yang berorientasi pada penyeimbangan pemanfaatan dan pelestarian sumber daya kelautan sehingga ketersediaannya dapat diperoleh secara kontinu. Dalam sudut pandang studi hubungan internasional, kehadiran *blue economy* memiliki keselarasan ide dengan wacana pembangunan global atau biasa disebut dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) dengan tajuk pembangunan berkelanjutan. Lebih spesifik terkait masalah kelautan, poin SDGs yang memiliki korelasi dalam konteks ini ialah poin 14 yakni pelestarian ekosistem laut. Pelestarian ekosistem laut pada sasaran SDGs poin 14 dimaknai sebagai ide dasar mewujudkan pembangunan kelautan berkelanjutan.

Indonesia juga menjadi salah satu negara yang memiliki fokus untuk melakukan pembangunan sektor kelautan berkelanjutan. Pada proses implementasinya, Indonesia mengadopsi ide *blue economy* untuk diterapkan sebagai dasar kebijakan kelautan. Adopsi oleh Indonesia diawali dari ucapan langsung Presiden Keenam Republik Indonesia yakni Susilo Bambang Yudhoyono. Beliau mempertegas langkah Indonesia pada KTT Rio 20+ di Brasil yang pada saat itu disampaikan bahwa "*For Indonesia, Blue Economy is Our Next Frontier*" dalam pidatonya (Sutardjo, 2012).

KTT Rio 20+ menekankan topik pembahasan pada penguatan wawasan lingkungan dalam melakukan pembangunan berkelanjutan. Susilo Bambang Yudhoyono berpendapat bahwa laut merupakan instrumen vital yang dapat diimplementasikan dengan menaruh konsentrasi keseimbangan antara perwujudan wacana global dan pelestarian lingkungan. Mulai dari titik inilah Indonesia menunjukkan komitmennya untuk dapat menggunakan *blue economy* sebagai ide dasar untuk memperbaiki kondisi kelautan dalam skala domestik maupun internasional (Saefuddin, 2015).

Seiring berjalannya waktu, kebijakan *blue economy* benar-benar diinternalisasi sebagai model kebijakan yang diarahkan untuk membangun ekonomi kelautan. Hal itu dibuktikan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014, dengan muatan dalil bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah melaksanakan kewenangannya melakukan pengelolaan kelautan melalui model kebijakan *blue economy*. Dalam konteks legalitas, *blue economy* menjadi salah satu prinsip dasar kebijakan kelautan Indonesia yang diproyeksikan dapat membawa manfaat untuk bersama. Hal ini didasari oleh kondisi geografis Indonesia dengan garis perairan yang luas, sehingga Indonesia memiliki tanggung jawab moral untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan sekaligus perbaikan lingkungan internasional (Krisman & Sinaga, 2020).

Komitmen Indonesia terhadap pembangunan kelautan berkelanjutan juga tampak tersirat pada visi Indonesia untuk menjadi "Poros Maritim Dunia" pada rezim Presiden Joko Widodo. Presiden Joko Widodo menyampaikan inisiatif Indonesia untuk menegaskan diri sebagai poros maritim dunia yang akan banyak memberikan pengaruh positif dalam bidang kemaritiman dunia (Yakti & Susanto, 2018). (Hal ini disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo pada Konferensi Tingkat Tinggi ke-9 Asia Timur, di Nay Pyi Taw:

"Oleh karena itu, sebagai negara maritim, Indonesia harus menegaskan dirinya sebagai Poros Maritim Dunia, sebagai kekuatan yang berada di antara dua samudera: Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Posisi sebagai Poros Maritim Dunia membuka peluang bagi Indonesia untuk membangun kerjasama regional dan internasional bagi kemakmuran rakyat (Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2014)".

Berangkat dari dasar gagasan tersebut dapat dipahami bahwa pembangunan sektor kelautan berkelanjutan Indonesia juga memuat

kepentingan dalam ranah Internasional. Hal ini disebabkan oleh kondisi dimana berdasarkan target SDGs poin ke-14 Indonesia harus menunjukkan komitmennya dalam pembangunan kelautan berkelanjutan. Disamping itu, pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo arah pembangunan sektor kelautan berkelanjutan Indonesia memuat orientasi politik luar negeri untuk memberikan pengaruh positif dalam aspek kemaritiman dunia. Maka dari itu, Indonesia perlu memainkan perannya dalam ranah politik luar negeri agar dapat mewujudkan pembangunan kelautan berkelanjutan secara menyeluruh.

Pada konteks politik luar negeri, Indonesia dapat diklasifikasikan sebagai negara *middle power*. Klaim tersebut didasari oleh pernyataan yang disampaikan langsung oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia yang tertuang pada “Rancangan Strategis Kementerian Luar Negeri 2015-2019”. Pada rancangan ini tertulis bahwa Indonesia memproyeksikan diri untuk konsisten memainkan perannya sebagai negara *middle power* pada aspek politik luar negeri. Secara umum, hal ini dilakukan dengan cara meningkatkan keterlibatan Indonesia pada tingkat internasional melalui kerjasama bilateral dengan negara mitra strategis dan organisasi internasional sehingga Indonesia dapat memberikan pengaruh sesuai kapabilitas *middle power*.

Melalui rangkaian pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah Indonesia memiliki fokus untuk melakukan pembangunan sektor kelautan berkelanjutan sesuai target SDGs dengan adopsi ide *blue economy* sebagai dasar kebijakannya. Narasi pidato Bapak Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo mengisyaratkan pembangunan kelautan berkelanjutan Indonesia juga diarahkan menjadi orientasi politik luar negeri. Penelitian ini menaruh perhatian pada hubungan antara orientasi politik luar negeri Indonesia sebagai poros maritim dunia dengan peran Indonesia sebagai *middle power* yang dipengaruhi oleh konsepsi *blue economy*.

Maka dari itu, penelitian ini tertarik untuk menganalisis peran Indonesia sebagai *middle power* dalam konteks perwujudan pembangunan kelautan berkelanjutan.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan beberapa literatur terdahulu sebagai dasar argumen yang akan disampaikan. Penulis telah mengelompokkan beberapa tinjauan literatur terdahulu sesuai dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Kelompok pertama ialah tinjauan literatur terdahulu seputar pembangunan kelautan berkelanjutan, diantaranya: (1) *mainstreaming ocean policy*; (2) redesain pembangunan ekonomi kelautan Indonesia; (3) *defining the blue economy*. Kemudian kelompok kedua memuat tinjauan literatur terdahulu tentang Indonesia sebagai *middle power*, diantaranya: (4) *the middle power moment*; (5) *Indonesia role as middle power*; (6) haluan baru politik luar negeri Indonesia (Bappenas, 2014).

Melalui beberapa uraian penelitian terdahulu diatas, dapat disimpulkan bahwa secara garis besar perbaikan lingkungan melalui pembangunan kelautan berkelanjutan menjadi titik fokus masyarakat internasional. Melalui masalah tersebut, *blue economy* dinilai mampu menjadi solusi inovatif dalam mewujudkan kepentingan Indonesia dalam ranah domestik maupun internasional. Dalam cakupan pembahasan politik luar negeri, kesamaan ide terletak pada klasifikasi Indonesia sebagai negara *middle power* dalam praktik politik luar negerinya. Namun sesuatu yang menjadi pembeda pada penelitian ini ialah penelaahan terkait langkah Indonesia menjadikan *blue economy* sebagai dasar dari fokus politik luar negerinya pada pembangunan sektor kelautan berkelanjutan.

KERANGKA KONSEPTUAL

Niche Diplomacy

Andrew F. Cooper mencetuskan pendekatan yang mampu membantu peninjauan perilaku negara *middle power* yakni *niche diplomacy*. Pencetusan konsep ini didasari oleh keresahan Andrew F. Cooper (1998) pada fungsi

kepemimpinan secara tradisional dalam tatanan global. Baginya, asumsi negara adidaya yang berperan sebagai pemegang kendali tatanan global secara *top-down* sudah tidak lagi relevan. *Niche diplomacy* jika dipahami secara harfiah berarti diplomasi ceruk yang memiliki konotasi bahwa adanya tindakan diplomasi yang spesifik atau khusus dalam suatu bidang tertentu. Dalam penerjemahan yang lebih spesifik, *niche diplomacy* akan membantu para negara berkapabilitas kekuatan menengah untuk dapat mewujudkan tujuan global dengan bidang yang lebih spesifik (Alden & Vieira, 2005).

Proposisi peninjauan fenomena hubungan internasional yang relevan dengan pendekatan ini tertuang dalam literatur yang dituliskan oleh Cooper dengan judul “*Niche Diplomacy: a Conceptual Overview*”. Proposisi yang pertama adalah penentuan keunggulan yang dimiliki oleh negara terkait. Aktor dalam pendekatan ini tentu harus menentukan terlebih dahulu suatu keunggulan dan kekhususan target diplomasi. Penentuan keunggulan ini berfungsi sebagai titik pembeda sumber kekuatan mereka dengan kekuatan besar lainnya (*great power*). Istilah keunggulan ini dapat merujuk pada komoditas, sumberdaya, letak geografis, atau bentuk apapun yang mampu menjadi pembeda dalam problematika internasional.

Proposisi yang kedua ialah terdapat indikasi perilaku negara-negara *middle power*. Artinya, negara akan memainkan peran negara *middle power* dalam rangka memenuhi kepentingannya. Secara spesifik, Cooper dkk memberikan gambaran tentang karakteristik perilaku yang dimiliki oleh negara *middle power*.

Pertama, negara akan bertindak sebagai *coalition building*. Pembentukan koalisi ini dilakukan dengan pendekatan kepada negara *non-middle power* yang memiliki keselarasan ide dalam menyikapi isu internasional tersebut. Sehingga penekanan koalisi yang dibentuk didasari oleh kesamaan ide untuk mendapatkan solusi dari sebuah permasalahan demi kepentingan bersama. *Kedua*, negara akan

berperan menjadi *bridge builder*. Upaya ini dilakukan agar terciptanya langkah kolektif dalam menjalankan solusi untuk mewujudkan kepentingan bersama. Hal ini sekaligus menjadi ranah bagi negara *middle power* untuk memanfaatkan statusnya agar menjadi penyeimbang kekuatan bagi negara *small power* untuk melakukan negosiasi dengan negara *great power* sehingga terwujud hubungan internasional yang lebih dinamis. *Ketiga*, negara berperan untuk menjadi *catalyst* atau katalisator. Langkah ini khususnya ditujukan kepada negara-negara lain agar dapat memahami bahwa norma internasional merupakan aturan yang bersifat universal.

Setelah adanya indikasi sesuai perilaku negara berkapabilitas kekuatan menengah, maka negara tersebut melakukan hibridasi kepentingan dalam politik luar negeri. Istilah “hibrid” dimaknai sebagai penggabungan dua aspek yakni internasional dan domestik dengan tetap memperhatikan urgensi keduanya. Maksud dari istilah ini adalah negara menyelaraskan keunggulan yang dimiliki dengan peluang kekosongan ruang dalam penyelesaian masalah global. Negara akan dengan cepat bertindak untuk mendistribusikan kekuatannya dengan basisnya sebagai *middle power* secara inovatif, cepat, dan strategis. Sesuai dengan basisnya sebagai negara *middle power*, negara melakukan hibridasi dengan melibatkan beberapa aktor lainnya dalam ranah internasional atas kesamaan ide yang telah dikerucutkan dalam nuansa *niche diplomacy*. Sehingga setelah adanya penentuan keunggulan yang dimiliki oleh negara, kemudian mereka menyelaraskan dan mengimplementasikannya dalam politik luar negeri sesuai dengan karakteristik *middle power*, kerangka *niche diplomacy* dapat terbentuk secara utuh.

Jika dioperasionalisasikan lebih mendalam, *niche diplomacy* yang diimplementasikan melalui peran negara sesuai karakteristiknya akan selaras dengan keberadaan Indonesia sebagai negara berbasis *middle power*. Ketersediaan garis perairan yang luas hingga potensi pemanfaatan sektor kelautan Indonesia

terhimpun menjadi sebuah wujud kepentingan nasional Indonesia dalam sektor sumber daya alam. Hal ini kemudian menjadi pemantik tercetusnya orientasi kebijakan pembangunan kelautan berkelanjutan berdasarkan prinsip *blue economy*. Sehubungan dengan orientasi pada sektor internasional, Indonesia dihadapkan pada tantangan untuk dapat melakukan pembangunan berkelanjutan dengan beberapa sasaran, salah satunya ialah pengelolaan ekosistem laut. Hal ini kemudian menjadi titik temu kepentingan internasional dan domestik yang semakin mengerucut pada spesifikasi sasaran politik luar negeri Indonesia yakni bidang pembangunan kelautan berkelanjutan.

METODE RISET

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian eksplanatif dengan analisis kualitatif. Pendekatan ini digunakan agar penulis mampu memberi pemahaman kepada pembaca terkait strategi politik luar negeri Indonesia dibidang kelautan secara terperinci dan komprehensif dalam konsentrasi pembangunan kelautan berkelanjutan berbasis *blue economy*. Hal itu membutuhkan penjelasan eksplanatori terkait hubungan antara beberapa variabel yang terdapat pada alat analisa sehingga dapat menjelaskan strategi Indonesia sebagai *middle power*.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam tulisan ini ialah metode studi literatur. Studi literatur dilakukan dengan mengkaji jurnal-jurnal, dokumen, laporan, dan tulisan ilmiah lainnya. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk data primer dan juga data sekunder. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini ialah dokumen Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP-RI) terkait operasionalisasi *blue economy*, dokumen Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia (KKBK-RI) Indonesia terkait dan juga buku yang memuat pembahasan tentang studi hubungan internasional. Sedangkan data sekunder seperti jurnal, artikel, dan juga berita

digunakan sebagai perolehan informasi bertema politik luar negeri Indonesia, kebijakan kelautan Indonesia, *blue economy*, dan lain-lain. Penggunaan data sekunder tetap diseleksi oleh penulis dengan standar literatur yang formal. Sehingga kombinasi antara penggunaan data primer dan sekunder membantu penulis untuk melengkapi kebutuhan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Orientasi Kebijakan Kelautan Indonesia: Pembangunan Kelautan Berkelanjutan

Indonesia menjadi salah satu dari 193 negara yang menyepakati implementasi SDGs pada tahun 2015. Artinya, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan sasaran SDGs yang memuat pembangunan sektor kelautan berkelanjutan global didalamnya. Pembangunan kelautan berkelanjutan yang tertulis pada sasaran keempatbelas menekankan agar aktor yang terlibat mampu mengelola sektor kelautan dengan merefleksikan diri dengan ekosistem alam. Hal ini merujuk pada penertiban tindakan eksploitatif dan juga penegakkan regulasi yang berlaku. Sehingga dengan adanya penerapan tersebut, ketersediaan sumberdaya kelautan akan dapat dimanfaatkan secara maksimal dan berkelanjutan.

Pasca KTT Rio 20+ Indonesia memiliki orientasi dalam melakukan pembangunan kelautan berkelanjutan ditandai dengan diadopsinya model kebijakan *blue economy*. Berdasarkan tinjauan kebijakan kelautan, Presiden SBY dan Joko Widodo memiliki fokus tersendiri dalam melakukan pembangunan kelautan berkelanjutan. Secara komprehensif Presiden SBY memproyeksikan pembangunan kelautan berkelanjutan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (RPJPN) (Ismail & Kartika, 2019). Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 menyiratkan informasi bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 diimplementasikan melalui beberapa tahap yang dinamakan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).

Tahapan RPJM dieksekusi dalam jangka waktu setiap lima tahun dengan tujuan dan sasaran tertentu pada setiap tahapannya.

Tabel 1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Sebagai Perwujudan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025

Rencana Pembangunan Jangka Menengah	Tahun	Tujuan
RPJM Nasional I	2005 – 2009	Penataan ulang pada segala aspek yang dimiliki oleh Indonesia dengan sasaran untuk menjadi negara aman, damai, demokratis, dan sejahtera.
RPJM Nasional II	2010 - 2014	Memantapkan penataan yang telah dilakukan, diiringi penguatan kualitas sumberdaya manusia agar memiliki kapabilitas yang memadai ditengah proses perkembangan zaman.
RPJM Nasional III	2015 - 2019	Memantapkan pembangunan secara komprehensif pada segala bidang dengan fokus utama yakni mampu memiliki keunggulan kompetitif yang meliputi keunggulan sumber daya alam, keunggulan sumberdaya manusia, dan penguasaan ilmu pengetahuan & teknologi.
RPJM Nasional IV	2020 - 2025	Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, damai, sejahtera, dan demokratis dengan pembangunan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang telah dilakukan.

Sumber: Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional. (2017). *Visi dan Arah Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025*.

Mengacu pada RPJPN dan RPJMN yang telah disusun pada masa pemerintahan Presiden SBY, Presiden Joko Widodo mencetuskan “Visi Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2030” sebagai salah satu implementasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 dalam perihal pembangunan sektor kelautan berkelanjutan. Sesuai dengan rentang waktunya, pencetusan landasan hukum visi kebijakan kelautan Indonesia yang terbaru tepat berada pada tahap RPJM Nasional III (Tabel 1) yakni Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017. Begitu pula terkait dengan nilai yang ingin diwujudkan, Indonesia memprioritaskan pembangunan sektor kelautan agar dapat menjadi negara maritim yang maju dan mandiri serta memanfaatkan kapabilitasnya untuk memberi sumbangsih bagi kepentingan bersama baik dalam skala nasional maupun internasional.

Secara spesifik, peraturan tersebut memiliki arah pembangunan kelautan yang tertuang dalam tujuh pilar kebijakan, diantaranya:: (1) pengelolaan sumber daya kelautan dan pengembangan sumber daya manusia; (2) pertahanan, keamanan, penegakan hukum dan keselamatan di laut; (3) tata kelola dan kelembagaan laut; (4) ekonomi dan infrastruktur kelautan dan peningkatan kesejahteraan; (5) pengelolaan ruang laut dan perlindungan lingkungan laut; (6) budaya bahari; (7) diplomasi maritim (Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2017). Beberapa pilar kebijakan kelautan tersebut kemudian diimplementasikan dengan tiga prinsip dasar agar seluruh program pembangunan dapat terlaksana sesuai kepentingan nasional. Ketiga prinsip yang dimaksud ialah wawasan nusantara pembangunan berkelanjutan dan ekonomi biru.

Wawasan nusantara maksudnya adalah pedoman pembangunan wajib menyelaraskan kepentingannya sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 agar perwujudan pembangunan selaras dengan ide dasar negara. Prinsip pembangunan berkelanjutan memiliki makna bahwa orientasi dari pembangunan yang

dilakukan harus dapat memenuhi kebutuhan jangka Panjang. Maka dari itu, upaya pemanfaatan yang dilakukan tidak diperbolehkan melebihi kapabilitas regenerasi ketersediaan sumberdaya tersebut. Langkah ini dapat terpenuhi melalui pendekatan yang ramah lingkungan dan juga inovatif seperti prinsip kebijakan kelautan yang terakhir yakni ekonomi biru. Prinsip ekonomi biru kebijakan kelautan Indonesia dimaknai sebagai pendekatan pemanfaatan sumberdaya kelautan yang menyeimbangkan pemanfaatan dan juga pelestarian lingkungan. Pelestarian yang dimaksud dalam konteks ini ialah mengurangi eksploitasi berlebihan, memperbaharui sumberdaya yang telah dimanfaatkan, dan juga menjaga kestabilan hidup sumberdaya sesuai ekosistem kelautan agar dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang.

Identitas Indonesia Sebagai Middle Power dan Implementasi Kebijakan Luar Negeri

Indonesia dapat diklasifikasikan sebagai salah satu wujud negara *middle power*. Hal ini dapat ditinjau melalui Rencana Strategis Kementerian Luar Negeri Tahun 2015-2019 yang menegaskan bahwa Indonesia akan terus konsisten memainkan peran *middle power* dalam aktivitas politik luar negerinya. Beberapa literatur terdahulu juga membuktikan bahwa berdasarkan rekam jejak politik luar negerinya Indonesia merefleksikan perilaku negara *middle power*. Nur Luthfi Hidayatullah berargumen bahwa berdasarkan peninjauan pada setiap rezim pemerintahan, Indonesia menunjukkan perilaku negara *middle power* (Hidayatullah, 2014). Indonesia secara konsisten mendistribusikan kekuatan menengahnya sebagai *assembler* dan *advocator*. Kedua perilaku itu tampak terjadi pada rezim Soekarno, Soeharto, dan Susilo Bambang Yudhoyono.

Menurut Benson & Lee, klasifikasi *middle power* terhadap Indonesia dapat ditinjau dari beberapa fenomena yang terjadi. Pertama ialah aktivitas politik luar negeri Indonesia pada

masa transisi orde baru terkesan lebih ‘peka’ terhadap dinamika sistem internasional. Benson & Lee mengungkapkan bahwa cuplikan peristiwa seperti terlibat dalam pembentukan komunitas keamanan ASEAN hingga keterlibatan dalam beberapa forum multilateral mengindikasikan Indonesia mampu memainkan perannya menjadi narahubung kepentingan antara aktor-aktor hubungan internasional (Benson & Lee, 2015). Sehingga dapat disepakati bahwa dalam rangka mengimplementasikan politik luar negeri ataupun mendistribusikan kekuatannya Indonesia akan menunjukkan kapabilitas kekuatan menengah (*middle power*).

Visi kebijakan kelautan Indonesia pada masa pemerintahan terkini yaitu pada era Presiden Joko Widodo mengisyaratkan pesan bahwa sektor kelautan menjadi objek yang akan dioptimalkan pemanfaatannya untuk kepentingan negara. Merujuk pada dasar kebijakan kelautannya, Indonesia berambisi untuk menjadi negara maritim yang berdaulat, mandiri, maju, dan mampu memberi kontribusi positif bagi dunia internasional dalam bidang kelautan. Mengacu pada pidato Joko Widodo di KTT Asia Timur ke-9, pemerintah Indonesia turut menyampaikan misinya dalam memberikan kontribusi pada pembangunan kelautan global. Dalam pidato tersebut disampaikan bahwa Indonesia akan meningkatkan kerjasama kelautan pada tingkat bilateral, multilateral, dan regional.

Wacana peningkatan kerjasama internasional Indonesia dibidang kelautan tersebut dapat direpresentasikan sesuai karakteristiknya sebagai negara *middle power*. Sesuai dengan pembahasan sebelumnya, karakteristik perilaku negara *middle power* ialah *coalition building*, *bridge builder*, dan *catalyst*. Sebagai *coalition building*, Indonesia dapat membentuk sebuah koalisi yang melibatkan negara-negara dengan orientasi perbaikan pengelolaan sektor kelautan. Pembentukan koalisi tersebut akan membantu Indonesia mewujudkan pembangunan kelautan berkelanjutan melalui upaya kolektif. Sebagai

bridge builder, Indonesia bertugas untuk menjadi narahubung kepentingan antara *great power* dan *small power* dalam proses pembangunan kelautan berkelanjutan. Dengan begitu, Indonesia akan mendapatkan citra sebagai *good international citizenship* sesuai dengan substansi dari *middle power* dalam mewujudkan kepentingan bersama (Alvian dkk, 2017). Sebagai *catalyst*, Indonesia bertugas menegakkan norma internasional terkait aspek kelautan dengan tujuan agar proses pembangunan yang dilakukan bersama dapat berjalan seadil-adilnya karena tetap berjalan beriringan dengan regulasi yang berlaku.

Pembangunan sektor kelautan berkelanjutan dalam skala global dapat diinterpretasikan melalui sasaran pembangunan berkelanjutan global (*sustainable development goals*) pada poin ke-14. Pada poin tersebut ditegaskan bahwa sektor kelautan merupakan elemen penting bagi kebutuhan hidup masyarakat global. Namun dalam kondisi terkini masih banyak dijumpai krisis kesehatan ekologis pada sektor laut akibat polusi, eksploitasi, dan juga pencemaran lingkungan yang mengancam ketersediaan sumber daya alam dimasa depan.

Maka dari itu, pengelolaan sektor kelautan yang tepat dan menyeluruh menjadi salah satu tantangan pembangunan untuk menuju masa depan berkelanjutan. Merujuk pada urgensi tersebut dapat dipahami bahwa kepentingan Indonesia pada aspek internasional ialah berpartisipasi dalam pemenuhan tantangan global perihal pembangunan sektor kelautan berkelanjutan melalui prinsip kebijakan kelautannya. Sehingga dengan upaya tersebut Indonesia dapat menunjukkan kontribusi positifnya pada sektor kelautan global.

Strategi Niche Diplomacy Indonesia dalam Manifestasi Pembangunan Kelautan Berkelanjutan ***Indonesia sebagai Coalition Building***

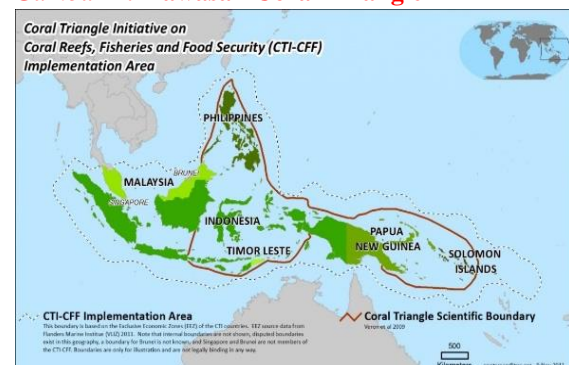
Pembentukan koalisi dalam konteks perilaku kekuatan menengah memiliki konotasi pembentukan koalisi informal. Artinya, koalisi yang dibentuk bersifat sukarela, tidak

mengikat, dan juga tidak berlandaskan pakta. Pembentukan koalisi yang dimaksud hanya berlandaskan adanya keselarasan prinsip dan ide oleh para anggotanya dalam menyelesaikan permasalahan internasional. Strategi yang digunakan negara *middle power* dalam pembentukan koalisi adalah menghimpun kekuatan negara *great power* dan *small power* dalam menyelesaikan permasalahan internasional. Dengan begitu, perwujudan kepentingan negara *middle power* dapat tercapai melalui upaya kolektif. Sesuai kapabilitasnya sebagai negara *middle power*, Indonesia membentuk beberapa koalisi dalam bentuk forum internasional yang menunjang pembangunan kelautan berkelanjutan dengan prinsip *blue economy*. Beberapa forum yang dimaksud ialah CTI-CFF dan AIS Forum.

Pembentukan The Coral Initiative on Coral Reefs, Fisheries and Food Security (CTI-CFF)

Pada tahun 2006, Indonesia dihadapkan pada kondisi perairan yang cukup mengkhawatirkan. Hal itu disebabkan oleh ketersediaan terumbu karang (*coral reefs*) sebagai elemen penting kesehatan ekosistem laut terancam punah (Magdalena, 2016). Kondisi ini terjadi akibat maraknya praktik penangkapan ikan yang bersifat eksploitatif sehingga merusak terumbu karang. Menurut Amin, kondisi tersebut mengakibatkan jumlah terumbu karang di perairan Indonesia yang memiliki indikasi cukup baik hanya sekitar 31%.

Gambar 1: Kawasan Coral Triangle



Sumber: Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fishiers, and Food Security. About: History of CTI-CFF.

Dalam level internasional, krisis serupa juga dijumpai pada kawasan segitiga terumbu karang (*coral triangle*). *Coral Triangle* merupakan wilayah laut dan pesisir di sekitar samudera hindia dan pasifik yang memiliki kelimpahan biota laut tertinggi di dunia. Luas *coral triangle* meliputi wilayah perairan Indonesia, Malaysia, Filipina, Papua Nugini, Kepulauan Solomon dan Timor Leste. Kawasan *coral triangle* disinyalir mengalami kerusakan biota terumbu karang hingga 85% dengan keterangan 45% dari nilai tersebut mengalami kerusakan parah (Fitriandita, 2018). Minimnya jumlah ketersediaan terumbu karang dengan kualitas cukup baik ini tentu akan menjadi ancaman bagi kesehatan ekosistem perairan Indonesia dan negara-negara yang berada dalam *coral triangle*.

Merujuk pada peristiwa ini, Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan pesan tentang urgensi dari *coral triangle* dalam Konvensi Keanekaragaman Hayati (COPS-8 CBD) di Brazil. Pesan yang disampaikan Susilo Bambang Yudhoyono tidak terlepas dari krisis terumbu karang yang mengancam stabilitas kehidupan biota laut. Berikutnya pada tahun 2007, Indonesia menjadi tuan rumah bagi pertemuan CT-6 yang melibatkan diskusi antara negara-negara *coral triangle*. Pertemuan CT-6 juga dihadiri oleh beberapa *International Non-Governmental Organization* yang bergerak dalam isu lingkungan hidup seperti *Convention International*, *The Nature Conservancy*, dan *World Wide Fund*. Singkatnya, pertemuan ini membahas tentang pengembangan dan pengelolaan terumbu karang yang sedang mengalami krisis. Hingga akhirnya pada tahun 2009 terbentuk kerjasama multilateral yaitu *The Coral Initiative on Coral Reefs, Fisheries and Food Security* (CTI-CFF). Kerjasama ini tetap melibatkan negara-negara *coral triangle* yakni Indonesia, Malaysia, Filipina, Papua Nugini, Kepulauan Solomon dan Timor Leste. CTI-CFF memiliki orientasi untuk mempertahankan kekayaan laut dan perairan pesisir.

Lebih spesifik, tujuan dibentuknya CTI-CFF ialah untuk menanggulangi ancaman ekosistem laut, wilayah pesisir laut dan juga pulau-pulau di wilayah *coastal triangle*. Tujuan tersebut direalisasikan melalui upaya perbaikan pemanasan global, manajemen kelestarian laut, manajemen perikanan, pengelolaan kawasan lindung laut, dan konservasi sumber daya. Partisipan CTI-CFF meyakini bahwa langkah ini merupakan tindakan progresif mengingat urgensi dari pengelolaan kelautan akan berdampak signifikan bagi kehidupan manusia. Hal ini juga menjadi representasi dari partisipan untuk dapat mewujudkan tantangan global bertajuk *Millenium Development Goals*.

Indonesia merupakan aktor penting dalam pembentukan *The Coral Initiative on Coral Reefs, Fisheries and Food Security*. Secara tersirat, momentum Konferensi Keanekaragaman Hayati (COPS-8) dan Forum CT-6 menjadi pembuktian bahwa Indonesia adalah inisiator dalam pembentukan CTI-CFF. Sebagai simbol kepemimpinannya dalam CTI-CFF, Indonesia membangun gedung sekretariat dan *CTI Center* untuk memfasilitasi kegiatan operasional dari organisasi ini. Perihal materil, Indonesia menginvestasikan 5,5 Juta USD untuk menunjang perkembangan pengelolaan kelautan pada wilayah konservasi CIT-CFF (Coral Triangle Initiative, 2021).

Pembentukan Archipelagic and Island States Forum

Pembentukan *Archipelagic and Island States Forum* (AIS) didasari oleh kenyataan bahwa masyarakat global sedang dihadapkan pada isu krisis lingkungan (AIS, 2021). Perubahan iklim, bencana alam, polusi laut, keterbatasan sumber daya alam menjadi wujud dari krisis lingkungan yang membahayakan kehidupan masyarakat global secara berkelanjutan. Keresahan atas krisis lingkungan ini dikhawatirkan akan membawa dampak buruk bagi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat global dikemudian hari. Merujuk pada urgensi tersebut, maka tentunya diperlukan inisiatif

yang solutif untuk menjaga kestabilan lingkungan hidup.

New York City Ocean Conference merupakan sebuah konferensi kelautan internasional yang melibatkan partisipasi perwakilan negara, organisasi internasional non-pemerintah, peneliti, dan komunitas ilmiah dengan orientasi pembangunan sektor kelautan berkelanjutan. Konferensi ini menjadikan SDGs poin ke-14 yang memuat tujuan pengelolaan kelautan berkelanjutan sebagai pokok pembahasan. Secara spesifik, konferensi New York menekankan bahwa sektor kelautan merupakan masa depan bagi keberlanjutan hidup masyarakat global dan diperlukan upaya kolektif untuk menjaga ketersediaan alamnya.

Konferensi Kelautan New York menghasilkan komitmen dari partisipan untuk bersama-sama mengimplementasikan SDGs poin ke-14 secara sukarela demi kepentingan pemanfaatan kelautan yang berkelanjutan. Berangkat dari komitmen ini, Indonesia menggelar Konferensi Negara Kepulauan pada tahun 2017 dengan tujuan untuk merealisasikan mitigasi krisis lingkungan pada sektor kelautan bagi negara kepulauan. Konferensi Negara Kepulauan pertama ini dihadiri oleh 20 delegasi negara kepulauan dan negara kepulauan Asia Pasifik. Konferensi ini melahirkan kesepakatan antara Indonesia dan *United Nations Development Programme* untuk membentuk sebuah sarana kerjasama yakni *Archipelagic and Island States Forum* (AIS) (Kemenko Bidang Kemaritiman, 2017).

Kemudian, pada 6-8 September 2018 Indonesia menggelar Konferensi Negara Kepulauan kedua yang dihadiri oleh delegasi dari 46 negara kepulauan. Konferensi kedua ini memiliki fokus pembahasan tentang kondisi perairan global dan juga elaborasi sasaran pembangunan kelautan yang efektif (Kominfo, 2018). Berikutnya, pada 1 November 2018 Indonesia kembali menggelar Konferensi Negara Kepulauan di Manado. Pada kesempatan ini sejumlah 21 negara kepulauan meratifikasi pembentukan *Archipelagic and Island States Forum* (AIS). Beberapa negara

yang menyepakati pembentukan forum ini ialah Britania Raya, Cabo Verde, Fiji, Filipina, Guinea Bissau, Indonesia, Jamaika, Jepang, Kuba, Madagaskar, Malta, Papua New Guinea, Saint Kitts and Navis, Sao Tome and Principe, Seychelles, Singapura, Siprus, Suriname, Sri Lanka, Tonga, dan Timor Leste. Terbentuknya *Archipelagic and Island States Forum* diproyeksikan untuk dapat menjadi prasarana untuk negara anggota dalam upaya mitigasi krisis lingkungan dengan melakukan kolaborasi dengan stakeholder yang selaras. Sehingga *Archipelagic and Island States Forum* mampu menghasilkan inovasi yang solutif dalam rangka menjawab tantangan global yakni SDGs poin ke-14.

Indonesia Sebagai Bridge Builder

Bridge builder atau narahubung kepentingan oleh negara *middle power* diimplementasikan dalam dua bentuk strategi. Pertama, negara *middle power* akan menjadi *normative balancing*. Artinya, negara *middle power* akan menguatkan kekuatan *small power* untuk mengimbangi keberadaan *great power*. Penyeimbangan kekuatan tidak memiliki tendensi konfrontatif, akan tetapi lebih kepada penyesuaian kepentingan ditengah perbedaan sehingga muncul hubungan yang lebih dinamis. Kedua, negara *middle power* akan menjadi fasilitator bagi *great power* ataupun *small power*. Negara *middle power* akan mengakomodasi kepentingan yang ada dalam mendistribusikan kekuatannya dalam menyelesaikan permasalahan internasional. Strategi ini menjadi salah satu upaya negara *middle power* untuk menjadi *good international citizenship*. Indonesia turut menunjukkan kapabilitasnya sebagai narahubung kepentingan antara *great power* dan *small power* dalam beberapa forum internasional guna mewujudkan pembangunan kelautan berkelanjutan. Beberapa forum internasional diantaranya APEC, IORA, dan AIS Forum.

Kontribusi Indonesia dalam APEC

Sebagai forum kerjasama yang berupaya meningkatkan perekonomian di wilayah Samudera Pasifik, APEC juga berupaya mempromosikan sektor kelautan sebagai basis pemanfaatan. Wacana ini tercetus pada KTT APEC di Bogor pada tahun 1994 atau lebih dikenal dengan istilah *Bogor Goals* pada poin ke-8 bahwa:

“Our objective to intensify development cooperation among the community of Asia-Pacific economies will enable us to develop more effectively the human and natural resources of the Asia-Pacific region so as to attain sustainable growth and equitable development of APEC economies, while reducing economic disparities among them, and improving the economic and social well-being of our people. Such efforts will also facilitate the growth of trade and investment in the Asia-Pacific region” (APEC, 1994).

Berdasarkan wacana tersebut dapat dipahami bahwa APEC menempatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia sebagai basis percepatan pertumbuhan perekonomian Asia Pasifik. APEC memproyeksikan pengembangan intensif pada aspek sumber daya alam dan sumber daya manusia dapat mendukung pembangunan berkelanjutan. Merujuk pada urgensi tersebut, APEC mempromosikan *blue economy* sebagai salah satu prioritas kerjasama pada KTT APEC ke-22 di Xiamen. Para anggota APEC menyepakati bahwa perlu adanya langkah penyesuaian dengan tren perekonomian global yang memiliki manifestasi pada pembangunan berkelanjutan (APEC, 2014). Maka dari itu, pendekatan *blue economy* diyakini mampu menjadi instrumen pemenuhan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di wilayah Asia-Pasifik. APEC mengharapkan para anggota dapat bersinergi untuk meningkatkan produktivitas ekonomi kelautan sekaligus mengimplementasikan *blue economy* sebagai pendekatannya.

Indonesia menjadi salah satu anggota APEC yang memberikan kontribusinya dalam

konteks penerapan *blue economy*. Sebagai wujud dari penerapan prinsip kerja anggota APEC, Indonesia secara sukarela turut berpartisipasi aktif dalam beberapa forum pengembangan model kebijakan *blue economy* seperti *APEC Blue Economy Forum* di China pada tahun 2012, *Asia Conference on Ocean Food Security and Blue Growth* di Bali pada tahun 2013, *The First Blue Economy Summit of Small Island Developing States* di Abu Dhabi pada tahun 2013, *The 8th World Blue Economy Conference* di Madrid pada tahun 2013, dan *The Global Ocean Action Summit* di Hague pada tahun 2014 (Rani & Cahyasaki, 2015). Kemudian Indonesia juga mengadopsi ide *blue economy* sebagai salah satu prinsip kebijakan kelautan nasional. Hal ini menjadikan pembangunan kelautan Indonesia senantiasa memperhatikan kondisi ekosistem laut sehingga dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Terakhir, Indonesia membentuk *APEC Ocean and Fisheries Information Center* (AOFIC). AOFIC merupakan fasilitas iptek yang dibangun oleh Indonesia di Bali. Fasilitas ini dapat menjadi sarana bagi APEC untuk melakukan tinjauan atas dinamika laut di kawasan Samudera Pasifik (Global Times, 2013). Tentunya, pembentukan AOFIC akan mempermudah anggota APEC dalam mengimplementasikan pembangunan kelautan berkelanjutan.

Kontribusi Indonesia dalam IORA: Jakarta Accord dan Rencana Aksi IORA 2017-2021

Indian Ocean Rim Association (IORA) dapat digambarkan sebagai organisasi antar pemerintah yang bertujuan untuk memperkuat kerjasama regional dan pembangunan berkelanjutan di wilayah Samudra Hindia. Sejak berdiri pada tahun 1997, IORA memiliki 23 negara anggota yakni Afrika Selatan, Australia, Bangladesh, India, Indonesia, Iran, Kenya, Komoro, Madagaskar, Maladewa, Malaysia, Mauritius, Mozambik, Oman, Perancis, Seychelles, Singapura, Somalia, Sri Lanka, Tanzania, Thailand, Uni Emirat Arab, dan Yaman. IORA memiliki beberapa prioritas

kerjasama dalam pemenuhan tujuan organisasi, diantaranya: (1)keselamatan dan keamanan maritim; (2)fasilitas perdagangan; (3)manajemen perikanan; (4)manajemen bencana; (5)kerjasama akademis dalam perkembangan iptek; (6)memajukan sektor pariwisata dan budaya (Kemenlu, 2019).

Merujuk pada prioritas kerjasamanya, dapat dipahami bahwa IORA memiliki fokus utama untuk meningkatkan intensitas ekonomi dan kemaritiman berkelanjutan pada wilayah Samudera Hindia. Hal ini disebabkan Samudera Hindia menyimpan potensi sumber daya kelautan yang mampu memberi sumbangsih besar bagi pertumbuhan perekonomian.

Menindaklanjuti urgensi ini, IORA menempatkan pendekatan *blue economy* sebagai opsi kebijakan yang rasional dalam pertumbuhan ekonomi berbasis pembangunan sektor kelautan berkelanjutan. Pembahasan terkait *blue economy* dalam forum IORA bermula pada Pertemuan Tingkat Menteri ke-13 di Perth. Pada pertemuan ini negara anggota IORA sepakat untuk memperkuat implementasi ekonomi biru agar dapat menstimulus ekonomi kelautan. Kemudian pembahasan terkait *blue economy* berlanjut pada forum dialog IORA di India pada tahun 2015. Pada kesempatan ini, negara anggota IORA mengelaborasi hal-hal teknis dalam implementasi *blue economy* (IORA, 2015). Setelah itu, Konferensi Tingkat Menteri Pertama Ekonomi Biru di Mauritius menjadi momentum penting implementasi *blue economy* oleh IORA. Pada konferensi ini IORA mendeklarasikan bahwa *blue economy* menjadi model kebijakan yang disepakati dalam langkah pembangunan kelautan berkelanjutan. Melalui konferensi ini, IORA mengklasifikasikan sasaran implementasi *blue economy* yang meliputi budidaya perikanan, energi laut terbarukan, konektivitas maritim, dan konservasi pesisir laut.

Indonesia sebagai salah satu negara anggota IORA turut memberikan kontribusi dalam wacana *blue economy* yang telah dideklarasikan. Kontribusi yang diberikan oleh

Indonesia dapat ditinjau pada inisiasi “*IORA Leaders Summit*” pada tahun 2017. *IORA Leaders Summit* merupakan Konferensi Tingkat Tinggi IORA ke-20 yang sukses diselenggarakan oleh Indonesia dengan tema utama “*Strengthening Maritime Cooperation for a Peaceful, Stable, and Prosperous Indian Ocean*”. (Maulana, 2018) Pada konferensi ini, Indonesia mencetuskan dua gagasan penting untuk pengembangan *blue economy* yakni *Jakarta Concord* dan Rencana Aksi IORA 2017-2021.

Secara khusus, isi dokumen *Jakarta Concord* menyatakan bahwa negara anggota diharapkan dapat mengembangkan potensi kelautan dalam menghadapi isu multi-sektor (ekonomi, sosial, dan lingkungan). Hal ini dapat dilakukan dengan mengimplementasikan *blue economy* sebagai pendekatan pembangunan kelautan berkelanjutan yang inklusif dan inovatif. Langkah pengelolaan sektor kelautan berkelanjutan tersebut diharapkan dapat dibuktikan melalui tindakan nyata sehingga proses pembangunan dapat berjalan progresif.

Rencana Aksi IORA 2017-2021 adalah pedoman kegiatan IORA pada masa kepemimpinan Indonesia yang meliputi aspek pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pedoman ini menyuratkan rancangan aksi pada pembangunan lingkungan dan kelautan dalam kerangka *blue economy*. Pembangunan kelautan berbasis *blue economy* tersusun oleh inisiatif jangka pendek, inisiatif jangka menengah, dan inisiatif jangka panjang (IORA, 2017).

Inisiatif jangka pendek dimulai dari pembentukan kelompok kerja *blue economy* dan menerapkan hasil lokakarya serta forum pertemuan pejabat tinggi bertema *blue economy* yang pernah diselenggarakan. Kemudian pada inisiatif jangka menengah, negara anggota diharapkan mampu mengembangkan mekanisme kerjasama yang pragmatis dalam pengembangan *blue economy*. Hal ini dapat dilakukan dengan menyelenggarakan program pelatihan ataupun program pengembangan

kapasitas teknis. Sedangkan pada inisiatif jangka panjang, negara anggota diharapkan mampu meningkatkan produktivitas dan pendapatan masyarakat pesisir melalui pengembangan sumber daya manusia.

Berdasarkan ketiga inisiatif tersebut, Indonesia menunjukkan simbol kepemimpinannya dengan membuktikan tindakan nyata pada inisiatif menengah. Hal ini diawali oleh penekanan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Kemenko Maritim) pada “*The 2nd IORA Blue Economy Conference*” di Jakarta, pada tahun 2017. Kemenko Maritim menegaskan bahwa inisiatif menengah dalam Rencana Aksi IORA 2017-2021 harus dijalankan dengan komitmen kesukarelaan (IORA, 2017). Sebagai wujud dari komitmen kesukarelaan, Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan mengadakan “*Workshop on Marine Aquaculture and Fish Health Management*” di Situbondo, pada 22-27 November 2017. Pelatihan ini dihadiri oleh delegasi dari 15 negara yakni Bangladesh, India, Kenya, Madagaskar, Malaysia, Mauritius, Mozambik, Oman, Seychelles, Singapura, Somalia, Sri Lanka, Tanzania, dan Thailand (IORA, 2017). Rangkaian program kegiatan ini meliputi praktek dan diskusi terkait budidaya ikan kerapu serta studi lapangan pada produksi ikan kerapu. Melalui kegiatan ini pemerintah Indonesia mengharapkan adanya interaksi ide dan keahlian yang dapat bersinergi dalam proses pemanfaatan sumber daya kelautan.

Kontribusi Indonesia dalam Archipelagic and Island States Forum

Berawal dari *New York Ocean Conference*, Indonesia bersama UNDP berinisiasi untuk membentuk *Archipelagic and Island States Forum* (AIS). Melalui forum ini, Indonesia berusaha untuk merangkul negara-negara kepulauan di dunia untuk mewujudkan SDGs poin ke-14 yakni pembangunan sektor kelautan berkelanjutan. Sejak AIS Forum terbentuk, Indonesia bersama para anggota terus

menunjukkan tindakan nyata menuju perwujudan SDGs poin ke-14 secara progresif. Hal ini dapat dibuktikan melalui dokumen resmi AIS yang dirilis pasca perumusan program kegiatan forum yang berjudul “*Draft Concept Note*”. Melalui proses diskusi yang dilakukan, AIS mencetuskan pedoman perwujudan pembangunan sektor kelautan berkelanjutan yang dinamakan “*smart and innovative solutions*”. *Smart and innovative solutions* tersusun atas empat aspek pembangunan yang meliputi adaptasi terhadap perubahan iklim, pengelolaan sampah plastik laut, pengembangan model ekonomi biru (*blue economy*) sebagai dasar pembangunan berkelanjutan, budidaya perikanan berkelanjutan, dan pengelolaan kemaritiman yang akuntabel.

Indonesia menjadi salah satu negara AIS Forum yang cukup aktif memberikan kontribusi dalam implementasi *smart and innovative solutions*. Pada aspek adaptasi terhadap perubahan iklim, Pemerintah Indonesia melalui Badan Meteorologi Krimetologi dan Geofisika (BMKG) menggelar *workshop* dengan tema “*Weather Modeling Prediction Training*”. Pada kegiatan ini BMKG menjadi fasilitator bagi negara anggota AIS Forum untuk mendapatkan wawasan terkait metode prediksi cuaca menggunakan basis big data dan algoritma prediksi.

Pada aspek pengembangan *blue economy*, Indonesia bersama UNDP menyusun konsepsi *blue economy development index* (BEDI). BEDI merupakan metode evaluasi holistik yang dapat digunakan untuk menilai tingkat perkembangan pengelolaan sumber daya laut atas penerapan *blue economy*. Konsepsi BEDI membawa beberapa manfaat bagi pembangunan sektor kelautan berkelanjutan, diantaranya: (1) mengukur potensi sumber daya kelautan; (2) memahami peluang dan tantangan pengelolaan kelautan; (3) mengukur manfaat sosial. (Adrianto, dkk., 2019) Kehadiran BEDI tentu akan memudahkan anggota AIS dalam mengimplementasikan *blue economy* secara

efektif serta memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam pembangunan kelautan berkelanjutan.

Indonesia Sebagai Catalyst

Catalyst atau juga sering dikenal dengan istilah *norms diffuser* direalisasikan oleh negara *middle power* dengan melakukan “*positive inducement*” dalam upaya penyelesaian masalah internasional (Jordan, 2003). Upaya ini diterapkan dengan cara melakukan upaya persuasif kepada kekuatan lainnya agar menaati norma internasional yang memiliki korelasi dengan inti permasalahan. Langkah ini perlu dilakukan oleh negara *middle power* dengan tujuan untuk mempertahankan legitimasinya sebagai penengah antara *great power* dan *small power*. Sebagai upaya perwujudan pembangunan kelautan berkelanjutan, Indonesia menegakkan norma UNCLOS 1982 dan juga IPOA-IUU.

Kontribusi Indonesia dalam Menegakkan UNCLOS 1982 dan IPOA-IUU

Illegal, Unreported, Unregulated Fishing adalah isu kelautan yang mengarah pada tindak kejahatan pada bidang perikanan. Secara harfiah, *illegal fishing* dimaknai sebagai kegiatan penangkapan ikan pada wilayah yuridiksi suatu negara tanpa prosedur perizinan dan melanggar ketentuan hukum yang berlaku (Lisnawati, 2020). Kemudian *unreported fishing* ialah kegiatan pemanfaatan sektor perikanan yang tidak dilaporkan ataupun tidak dilaporkan dengan semestinya kepada otoritas yang berwewenang sehingga melanggar hukum yang berlaku. Sedangkan *unregulated fishing* merupakan kegiatan pemanfaatan sektor perikanan yang dilakukan di wilayah perairan yang belum memiliki pengaturan konservasi. Kegiatan *unregulated fishing* juga bisa mengarah pada tindakan kriminal yang dilakukan lintas batas negara, terorganisir, dan dapat menyebabkan kerusakan serius bagi kondisi perairan yuridiksi tertentu.

Menurut Lisnawati, tindakan *IUU Fishing* membawa dampak buruk untuk sektor ekonomi

dan lingkungan bagi sebuah negara. Pada sektor ekonomi, penangkapan ikan secara ilegal dan tidak memenuhi prosedur pelaporan akan merugikan kondisi finansial negara. Berdasarkan analisis kuantitatif pada penelitian Annis Susanti dkk, Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia mengalami kerugian hingga 6 triliun/tahun. (Susanti, dkk., 2020) Kondisi seperti ini tentu mengancam ketersediaan sumber daya kelautan yang dimiliki oleh negara secara berkelanjutan.

Upaya pendisiplinan tindakan *IUU Fishing* telah diatur dalam regulasi *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982 dan *International Plan of Action to Prevent, Deter, and Eliminate IUU Fishing* (IPOA-IUU). UNCLOS 1982 menetapkan ketentuan hukum yang menyeluruh untuk mengatur penggunaan kelautan dan sumberdayanya. Tertulis pada pasal 57 UNCLOS 1982 bahwa wilayah laut sejauh 200 mil diluar laut teritorial suatu negara menjadi zona ekonomi eksklusif (ZEE) bagi negara tersebut. Pada zona ekonomi eksklusif (ZEE) negara memiliki hak utuh untuk melakukan pemanfaatan, eksplorasi, pengelolaan sumber daya alam, riset, konservasi, dan lain-lain. Hal ini menyiratkan pemahaman bahwa wilayah kelautan suatu negara bersama zona ekonomi eksklusifnya tunduk pada hukum yang berlaku pada negara tersebut. Sehingga, apabila terdapat tindakan *IUU Fishing* oleh pihak asing maka jelas tindakan tersebut melanggar ketentuan hukum laut internasional yakni UNCLOS 1982.

IPOA-IUU menjadi salah satu wujud kesepakatan negara-negara di dunia untuk memberantas tindakan *IUU Fishing*. Berawal dari keresahan atas maraknya praktik *IUU Fishing*, kerangka solusi IPOA-IUU didiskusikan pada konsultasi ahli di Sydney, pada tahun 2000 (FAO, 2001). Kemudian hasil dari konsultasi ini menjadi bahan diskusi lanjutan pada perumusan teknis solusi prakti *IUU Fishing* di Roma pada bulan Februari 2001. Setelah melalui proses diskusi panjang, pada bulan Maret 2001 negara anggota FAO

sepakat bahwa IPOA-IUU dapat menjadi rujukan bagi dunia internasional untuk menanggulangi praktik IUU Fishing. Secara umum, IPOA-IUU memberikan solusi bagi negara-negara agar memastikan bahwa sanksi terhadap pelaku *IUU Fishing* dapat mencegah, memberikan efek jera, dan efektif menghilangkan praktik *IUU Fishing* serta tidak memberikan keuntungan ekonomi bagi para pelaku.

Mengacu pada pembahasan diatas, dapat dipahami bahwa UNCLOS 1982 dan IPOA-IUU menjadi norma internasional dalam upaya pemberantasan tindak IUU Fishing. Norma internasional dimaknai sebagai seperangkat aturan yang dibentuk atas dasar kesepakatan dari anggota (negara-negara) yang terlibat perihal masalah yang sedang terjadi (Martinsson, 2011). Aturan ini kemudian melahirkan tanggung jawab bagi pemangku kepentingan untuk menaati, menegakkan, dan menerapkan isi kesepakatan yang telah diratifikasi. Sehingga jika dikontekstualisasikan pada proses teretusnya UNCLOS 1982 dan IPOA-IUU maka kedua kesepakatan ini dapat divalidasi sebagai bentuk dari norma internasional.

Indonesia merupakan salah satu negara yang meratifikasi UNCLOS 1982 dan IPOA-IUU. Sejauh ini Indonesia cukup aktif mengkampanyekan bahaya IUU Fishing diiringi dengan penegasan norma internasional yang berlaku. Pada pertemuan *4th Expanded ASEAN Maritime Forum* di Manado, Indonesia menekankan kepada para anggota tentang pentingnya perhatian atas tindak *IUU Fishing* karena hal tersebut merupakan ancaman nyata terhadap kedaulatan dan kekayaan negara (Dirjen Kerjasama ASEAN, 2016). Berdasarkan urgensi tersebut, Indonesia mengajak para partisipan untuk menyusun regulasi khusus sebagai wujud solusi atas ancaman *IUU Fishing*. Upaya Indonesia untuk menemukan solusi IUU Fishing pada *4th EAMF* ditindaklanjuti oleh *ASEAN Regional Forum* dalam “*ARF Statement on Cooperation to Prevent, Deter, And Eliminate Illegal,*

Unreported, and Unregulated Fishing”. Deklarasi ARF menghasilkan solusi pemberantasan *IUU Fishing* bagi negara ASEAN yaitu memberikan sanksi tindakan kriminalitas ini sesuai kesepakatan UNCLOS 1982 yang memberikan landasan hukum untuk perlindungan sumber daya laut dan tindakan eksploitasi negara. Hal inipun secara konsisten dibahas dalam pertemuan ARF seperti *the 7th ASEAN Regional Forum Inter-Sessional Meeting on Maritime Security*, *the 8th ASEAN Regional Forum on Maritime Security*, *the 9th ASEAN Regional Forum Inter-Sessional Meeting on Maritime Security*, dan *the 24th ASEAN Regional Forum* (Harun, 2020).

Selanjutnya, Indonesia juga tampak menerapkan kesepakatan IPOA-IUU sebagai konsekuensi dari anggota FAO yang meratifikasi kesepakatan tersebut. Pada Pasal 28 dalam kesepakatan IPOA-IUU tertulis bahwa negara anggota dianjurkan untuk menerapkan prinsip “*cooperation between states*”. Hal ini ditujukan agar upaya pemberantasan IUU Fishing dalam proses perwujudan sektor kelautan berkelanjutan cepat terealisasi. Merujuk pada pasal tersebut, Indonesia bersama Australia menginisiasikan pembentukan *Regional Plan of Action-IUU* (RPOA-IUU). Pembentukan RPOA-IUU akhirnya disusul oleh tanda tangan kerjasama oleh Australia, Brunei, Filipina, Indonesia, Kamboja, Malaysia, Papua Nugini, Singapura, Timor Leste, Thailand dan Vietnam. Berdasarkan hasil pertemuan RPOA-IUU di Malaysia pada tahun 2007, terdapat lima tindakan utama dalam kerjasama RPOA-IUU yaitu pengelolaan sumber daya kawasan, pembentukan kapasitas regional, penguatan *management control system*, *port sea measures*, dan pemenuhan kewajiban negara pantai (Budiyaniti & Sudirman, 2019).

KESIMPULAN

Pemerintah Indonesia berorientasi untuk mewujudkan pembangunan kelautan berkelanjutan global. Langkah perwujudan ini didasari oleh kepentingan Indonesia dalam mengoptimalkan potensi kelautan nasional dan juga menunjukkan komitmennya untuk berkontribusi pada pembangunan sektor kelautan berkelanjutan global. Berkaitan dengan perwujudan pembangunan kelautan berkelanjutan global, Indonesia memainkan peran sebagai *middle power*. Hal ini mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia yang tertulis bahwa Indonesia akan terus konsisten memainkan perannya sebagai negara *middle power* dalam pemenuhan kepentingan politik luar negeri. Maka dari itu, Indonesia perlu menerapkan strategi politik luar negeri yang terarah guna mewujudkan pembangunan kelautan berkelanjutan sesuai dengan kapabilitasnya yaitu *middle power*.

Berdasarkan hasil penelitian, strategi pemerintah Indonesia ialah memprioritaskan pembangunan kelautan berkelanjutan dalam kebijakan kelautan nasional dan juga berkomitmen untuk memberi kontribusi pada pembangunan kelautan berkelanjutan dunia dengan prinsip *blue economy*. Komitmen tersebut akan diwujudkan dengan cara meningkatkan kerjasama dibidang kelautan pada tingkat bilateral, multilateral, dan regional. Secara spesifik bentuk dari perwujudan komitmen tersebut ialah Indonesia telah menjadi inisiator pembentukan forum kerjasama sektor kelautan berkelanjutan, menjadi narahubung negara-negara dalam kepentingan pembangunan kelautan berkelanjutan, dan menegakkan norma internasional pada sektor kelautan untuk kepentingan bersama.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia memberikan kontribusi pada pembangunan kelautan berkelanjutan global melalui perannya sebagai *middle power*. Hal ini tentu menguatkan beberapa argumen literatur terdahulu yakni

sesuai rekam jejak politik luar negerinya Indonesia memainkan peran sebagai *middle power*. Hasil penelitian ini sekaligus menunjukkan bahwa adanya hubungan antara variabel independen dan dependen yang dijelaskan melalui aplikasi teori dalam penelitian ini. Hubungan tersebut ditunjukkan melalui peranan Indonesia sebagai *middle power* dipengaruhi oleh komitmen Indonesia dalam mewujudkan pembangunan kelautan berkelanjutan berbasis *blue economy*, khususnya dalam skala internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrianto, L., dkk. (2019). 'Blue Economy Development Index: A Conceptual Framework'.
- Alden, C., & Vieira, M. A. (2005). 'The New Diplomacy of the South: South Africa, Brazil, India and Trilateralism', *Third World Quarterly*, 26.7, 1077–95 <<https://doi.org/10.1080/01436590500235678>>.
- Alvian, R. A., dkk. (2017). Haluan Baru Politik Luar Negeri Indonesia: Perbandingan Diplomasi "Middle Power" Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo.
- Cooper, A. F. (1998). Andrew F. Cooper, *Niche Diplomacy: Middle Powers after the Cold War*.
- Archipelagic and Island States Forum. *About: Background*. Diakses dari: <https://www.aisforum.org/about>. Diakses pada: 10 Agustus 2021.
- Archipelagic and Island States Forum. *About: The Vision*. Diakses dari: <https://www.aisforum.org/about>. Diakses pada: 9 Agustus 2021
- Archipelagic and Island States Forum. *Smart and Innovative Solutions*. Diakses dari: <https://static1.squarespace.com/static/5d285a05b4ed260001751e86/t/5d9bedc7b9c85c1e7419bb38/1570500045679/Smart+and+Innovative+Solutions.pdf>. Diakses pada: 17 Agustus 2021.
- Asia-Pacific Economic Cooperation. *APEC Leaders Declaration 2014*. Diakses dari: https://www.apec.org/Meeting-Papers/Leaders-Declarations/2014/2014_aelm. Diakses pada: 21 Agustus 2021.

- Asia-Pacific Economic Cooperation. *The 2nd APEC Economic Leaders' Meeting 1994 - APEC Economic Leaders' Declaration of Common Resolve*.
- Biro Perencanaan dan Informasi Kemenko Bidang Kemaritiman. (November, 2017). *Berita: Konferensi AIS Sepakati Pembentukan Forum Negara Kepulauan Atasi Dampak Perubahan Iklim*. Diakses dari: <https://maritim.go.id/konferensi-ais-sepakati-pembentukan-forum-negara-kepulauan/>. Diakses pada: 10 Agustus 2021.
- Budiyanti, M. D., & Sudirman, A. (2019). Implementasi RPOA-IUU di Kawasan Asia Tenggara. *Jurnal Hubungan Internasional Tahun XII No.2*, hal. 316-318.
- Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fishiers, and Food Security. *Host Country Agreement*. Diakses dari: <https://www.coraltriangleinitiative.org/host-country-agreement>. Diakses pada: 13 Agustus 2021.
- Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN, Masyarakat ASEAN: *Membangun Kiprah Maritim Indonesia Di Kawasan, Kementerian Luar Negeri RI*, 2016.
- Fitriandita, N. S. (2018). 'Upaya Coral Triangle Initiative on Coral Reefs Fisheries and Food Security (CTI-CFF) Dalam Pelestarian Kawasan Segitiga Terumbu', 6.4, 1651–68.
- Food and Agriculture Organization of United Nations. (2001). *International Plan of Action to Prevent, Deter, and Eliminate IUU Fishing (IPOA-IUU)*.
- Global Times. (September, 2013). *China-Indonesia to Corporate on Ocean Conversation*. Diakses dari: <https://www.globaltimes.cn/content/816462.shtml>. Diakses pada: 20 Agustus 2021.
- Harun, J. B. P. (2020). Peran ASEAN regional Forum dalam Menciptakan Kawasan Bebas Illegal, Unregulated, Unreported Fishing di Indonesia Tahun 2015-2017. *JOM Fisip Vol. 7 (2)*.
- Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. *Transkrip Pidato: Pidato Presiden RI Presiden Joko Widodo Pada KTT ke-9 Asia Timur, di Nay Pyi Taw, Myanmar, 13 November 2014*. Diakses dari: <https://setkab.go.id/pidato-presiden-ri-joko-widodo-pada-ktt-ke-9-asia-timur-di-nay-pyi-taw-myanmar-13-november-2014/>. Diakses pada 21 Maret 2021.
- Indian Ocean Rim Association. (Agustus, 2015). *Concept Note: IORA Blue Economy Dialogue on Prospects of Blue Economy on Indian Ocean*, hal. 1-2.
- Indian Ocean Rim Association. (Mei, 2017). *Second Ministerial Blue Economy Conference*. Diakses dari: <https://www.iora.int/en/events-media-news/events/priorities-focus-areas/blue-economy/2017/second-ministerial-blue-economy-conference-bec-ii>. Diakses pada: 13 Agustus 2021.
- Indian Ocean Rim Association. (September, 2017). *Concept Note: Workshop on Marine Aquaculture and Fish Health Management*, hal 1-3.
- Indian Ocean Rim Association. (September, 2017). *Press Release: Training Workshop On Marine Aquaculture And Fish Health Management*, hal 1.
- Indian Ocean Rim Association. *About IORA*. Diakses pada: <https://www.iora.int/en/about/about-iora>. Diakses pada: 11 Agustus 2021.
- Indian Ocean Rim Association. *IORA Action Plan 2017-2021*. Diakses dari: <https://www.iora.int/media/1031/iora-action-plan-7-march-2017.pdf>. Diakses pada 13 Agustus 2021.
- Indian Ocean Rim Association. *Member States*. Diakses pada: <https://www.iora.int/en/about/member-states>. Diakses pada: 11 Agustus 2021.
- Indian Ocean Rim Association. *The Indian Ocean Dialogue*. Diakses pada: <https://www.iora.int/en/flagship-projects/the-indian-ocean-dialogue>. Diakses pada: 13 Agustus 2021.
- Ismail, H. A., & Kartika, E. (2019) 'Peran Kemaritiman Indonesia Di Mata Dunia', *Jurnal Sains Dan Teknologi Maritim*, 20.1X, 83–89 <<https://doi.org/10.33556/jstm.v20i1.222>>.
- Jordan, E.. (2003). *The Concept of a Middle Power in International Relations: Distinguishing Between Emerging and Traditional Middle Powers*. *Politikon*. Vol. 30, hal. 165.
- Kementerian Komunikasi dan Informasi RI. (September, 2018) *Artikel GPR: Indonesia Tawarkan Solusi Cerdas dan Inovatif dalam Pertemuan Negara Kepulauan dan Negara Pulau ke-2*. Diakses dari: <https://kominfo.go.id/index.php/content/det>

- [ail/14369/indonesia-tawarkan-solusi-cerdas-dan-inovatif-dalam-pertemuan-negara-kepulauan-dan-negara-pulau-ke-2/0/artikel_gpr](#). Diakses pada: 11 Agustus 2021.
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (April, 2019). *Kerjasama Regional: Indian Ocean Rim Association*. Diakses pada: https://kemlu.go.id/portal/id/read/167/halaman_list_lainnya/indian-ocean-rim-association. Diakses pada: 12 Agustus 2021.
- Krisman, K., & Sinaga, L. C. (2020) 'Menakar Keberlanjutan Visi Poros Maritim Dunia Di Tengah Agenda Pembangunan Maritim Regional', *Jurnal Penelitian Politik*, 17.1, 103
<<https://doi.org/10.14203/jpp.v17i1.858>>.
- Lisnawati. (2020). *Kebijakan Pemberantasan Illegal, Unreported, Unregulated (IUU) Fishing di Indonesia*, dalam Firdausy, C. M.. (2020). *Kebijakan Pembangunan Ekonomi Kelautan Indonesia: Quo Vadis?*. Yayasan Pustaka Obor, hal.112.
- Martinsson, J. (2011). 'Innovative Solutions for GovernAnCe Global Norms: Creation, Diffusion, and Limits'.
- Maulana, D. (2018). 'Diplomasi Maritim Indonesia Dalam Indian Ocean Rim Association (IORA): Peluang Dan Tantangan', *Intermestic: Journal of International Studies*, 2.2, 171.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Ekonomi Kelautan Indonesia.
- Rani, F., & Cahyasari, W. (2015). 'Motivasi Indonesia Dalam Menerapkan Model Kebijakan Blue Economy Masa Pemerintahan Joko Widodo', *Jurnal Transnasional*, 7.1, 1914–28.
- Saefuddin, A. (2015). 'Perguruan Tinggi, Peran Pemerintah dan Pengembangan Blue Economy', *Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan: Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian Dan Lingkungan*, 1.3, 135
<<https://doi.org/10.20957/jkebijakan.v1i3.10289>>.
- Susanti, A., dkk. (2020). 'Dampak Ekonomi Akibat Iuu Fishing Perikanan Tangkap Pelagis Besar Di Wppnri 715', *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, 15.2, 135
<<https://doi.org/10.15578/jsekp.v15i2.8178>>.
- Sutardjo, S. C. (2012). *Kebijakan Ekonomi Kelautan Dengan Model Ekonomi Biru*. Jakarta: Kementrian Kelautan dan Perikanan, hal. 17.
- Magdalena, T. (2016). 'Kepentingan Indonesia Aktif Dalam CTI (Coral Triangle Initiative)', *Jom Fisip*, 3.2, 1–5.
- UNEP. *Goal 14: Life Below Water*. Diakses dari: <https://www.unep.org/explore-topics/sustainable-development-goals/why-do-sustainable-development-goals-matter/goal-14>. Diakses pada: 5 Juli 2021.
- Yakti, P. D., & Susanto, J. (2018). 'Poros Maritim Dunia Sebagai Pendekatan Strategi Maritim Indonesia: Antara Perubahan Atau Kesenambungan Strategi?', *Jurnal Global & Strategis*, 11.2 (2018), 108
<<https://doi.org/10.20473/jgs.11.2.2017.108-125>>.

BIOGRAFI

Abdul Basir Donny Polanunu Abdul Basir Donny Polanunu, lahir di Sidoarjo, 21 Oktober 1999. Saat ini sedang menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Malang dalam Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Dalam studi hubungan internasional, minat kajian penulis ialah kajian kontemporer seperti isu lingkungan, intermestik, dan paradiplomasi. Penulis dapat dihubungi melalui email: abbasdonny@gmail.com.

Demeiati Nur Kusumaningrum merupakan dosen Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, di Universitas Muhammadiyah Malang. ekonomi politik global, politik internasional, diplomasi, kajian Kawasan Amerika, dan kajian Kawasan Asia Timur.